



**PERUBAHAN KEDUA RENSTRA  
2019 - 2024  
SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR  
Jl. Indrapura No. 1 Telp. (031) 3526130  
Surabaya 60175**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
Bab 1. Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	9
Bab 2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	23
Bab 3. Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah .....	25
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	25
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	27
3.3. Telaahan Renstra K/L .....	30
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	30
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	30
Bab 4. Tujuan dan sasaran .....	35
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	35
Bab 5. Strategi dan arah kebijakan .....	37
Bab 6. Rencana program dan kegiatan .....	39
Bab 7. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan .....	70
Bab 8. P e n u t u p .....	77

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1.	Klasifikasi ASN dan PTT-PK Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur berdasarkan status Kepegawaian Tahun 2021 .....	15
Tabel 2.2.1.	Klasifikasi ASN dan PTT-PK Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur berdasarkan status Kepegawaian Tahun 2021 .....	16
Tabel 2.2.2.	Klasifikasi jumlah ASN dan PTT-PK setiap Bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur .....	16
Tabel 2.2.3.	Klasifikasi Aparatur Sipil Negara Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur berdasarkan golongan .....	16
Tabel 2.2.4.	Klasifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur berdasarkan tingkat Pendidikan .....	16
Tabel 2.2.5	Klasifikasi Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kinerja (PTT-PK) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur berdasarkan tingkat Pendidikan.....	16
Tabel 2.2.6	Asset/Modal Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 .....	17
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Jawa Timur .....	18
Tabel 2.4.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah .....	20
Tabel 3.5.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	26
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur .....	36
Tabel 5.1	Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan .....	38
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan 2019.....	42
Tabel 6.2.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan 2020 .....	49
Tabel 6.3.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan 2021 s.d Th. 2024 (Sesuai dengan PMD 90 Th. 2019 & KEMENDAGRI 050 Th. 2020) .....	53
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 .....	73
Tabel 7.2.	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Nawa Bhakti .....	75

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 adalah suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah.

Dalam rangka pengintegrasian dengan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan di daerah membutuhkan upaya sinkronisasi, koordinasi dan integrasi yang signifikan guna mendukung capaian pembangunan secara nasional. Oleh karena itu pembangunan di daerah berpedoman pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai suatu system pembangunan guna menghasilkan rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang secara integral yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan keterlibatan masyarakat di daerah dan pusat. Hal ini seiring dengan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Demikian pula dengan ayat (2) pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut menyebutkan bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pada Tahun 2019 Menteri Dalam Negeri RI memberlakukan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berakibat Perubahan pada Renstra Organisasi Perangkat Daerah. Terbitnya Permendagri

Nomor 90 Tahun 2019 membawa perubahan yang signifikan dalam sistem Perencanaan terutama untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, selain harus mempedomani program atau kegiatan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga harus sudah mengakomodir kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan:

1. Perencanaan pembangunan daerah;
2. Perencanaan anggaran daerah;
3. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
4. Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5. Pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. Pengawasan keuangan daerah; dan
7. Analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompokan informasi menuju *single codebase*, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, *accountable*, *responsible*, serta *reliable* sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Salah satu kondisi yang menjadi perhatian Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyusunan Perubahan Kedua Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 adalah merebaknya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia pada awal tahun 2020 yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 yang meluas di berbagai negara memiliki dampak keekonomian yang perlu diantisipasi dan direspons oleh seluruh negara termasuk Indonesia. Salah satu bentuk respons Pemerintah dalam menangani permasalahan ini adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PerPPU) Nomor 1 Tahun 2020

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu ini secara umum mengatur dua hal, yaitu kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Mengingat dampak wabah Covid-19 yang diperkirakan akan berdampak pada perekonomian global hingga beberapa tahun kedepan, Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai dokumen perencanaan jangka menengah telah mencantumkan berbagai respons yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya PerPPU 1 Tahun 2020. Respons tersebut berupa strategi-strategi yang dirumuskan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 pada aspek pengelolaan fiskal dan perekonomian serta langkah - langkah yang mengarah pada upaya recovery perekonomian nasional pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

Keseluruhan strategi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain dari sisi kebijakan dan strategi untuk merespons dan mendukung penanganan Covid-19, target pada indikator kinerja yang tercantum dalam Perubahan Renstra juga disesuaikan dengan kondisi terkini dengan proyeksi yang lebih realistis mengingat pandemi Covid-19 akan berdampak pada pemulihan kondisi ekonomi nasional dalam jangka menengah. Perubahan asumsi dan skenario dalam perhitungan indikator ekonomi menjadi salah satu pokok perhatian dalam merumuskan target yang digunakan sebagai indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur.

Dalam segi pemerintahan, penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah membawa perubahan mendasar pada target dan indikator yang telah ditetapkan oleh masing-masing OPD. Kebijakan Indonesia Satu Data menjadikan indikator seluruh perangkat daerah yang ada di Indonesia menjadi seragam. Pengukuran dan komparasi kinerja antara satu daerah dengan daerah

lainnya bisa disandingkan dengan baik. Oleh karena itu berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, maka target dan indikator yang telah ditetapkan OPD berubah menjadi indikator yang ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah perubahan ini secara otomatis merubah target yang telah ditetapkan OPD.

Mendasari hal tersebut maka Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur memandang perlu memandang perlu melakukan pengkajian kembali terhadap muatan dan substansi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2014-2019. Selanjutnya disusun kedalam implementasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur untuk dituangkan dalam Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 guna mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2019-2024 supaya dapat tercapai dengan baik. Selain itu, perubahan Renstra 2019-2024 juga diperlukan karena kondisi dinamis internal Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur yang mengalami perubahan

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004

- Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  7. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang

- Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4833)
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  20. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Perangkat Daerah) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
31. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur adalah untuk :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu tahun 2019-2024 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Timur.
- b. Melakukan Sinergitas dan Harmonisasi dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang tertuang pada tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur ini Tahun 2019-2024 adalah :

- a. Melakukan evaluasi dan pengkajian ulang terhadap muatan/ substansi serta capaian Renstra Tahun 2014-2019 serta melakukan penyempurnaan muatan dan substansi Renstra Tahun 2019-2024 sebagai tindak lanjut program dan

kegiatan Renstra sebelumnya dengan menyesuaikan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur;

- b. Melakukan evaluasi dan pengkajian ulang terhadap Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dikarenakan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- c. Melakukan evaluasi dan pengkajian ulang terhadap anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan karena merebaknya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia pada awal tahun 2020 yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia sehingga setiap OPD, termasuk Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur harus melakukan realokasi dan refocusing besar-besaran guna membangun jaring pengaman sosial demi meminimalisir dampak sosial, kesehatan dan ekonomi dari pandemi COVID-19;
- d. Menjadi instrumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD dan pedoman Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam menyusun Rencana Kerja;
- e. Menjadi tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

##### **Bab 1. Pendahuluan**

1.2. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## **Bab 2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

## **Bab 3. Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

## **Bab 4. Tujuan dan sasaran**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

## **Bab 5. Strategi dan arah kebijakan**

## **Bab 6. Rencana program dan kegiatan**

## **Bab 7. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan**

## **Bab 8. P e n u t u p**

## **BAB 2**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi sebagai berikut :

A. Tugas pokok Sekretariat DPRD adalah :

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan;
- b. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi;
- c. Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

B. Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Provinsi;
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi, terdiri atas:

- a. Sekretaris DPRD.
- b. Bagian Umum, membawahi:

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan; dan
  3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol;
- c. Bagian Persidangan, membawahi :
1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
  2. Sub Bagian Komisi dan Panitia; dan
  3. Sub Bagian Layanan Aspirasi Masyarakat.
- d. Bagian Keuangan, membawahi :
1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
  2. Sub Bagian Perbendaharaan; dan
  3. Sub Bagian Verifikasi.
- e. Bagian Perundang-undangan, membawahi :
1. Sub Bagian Produk Hukum;
  2. Sub Bagian Data dan Perpustakaan; dan
  3. Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Publikasi.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi bagian berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

#### 1. BAGIAN UMUM

Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, pemeliharaan, dan rumah tangga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tata usaha DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. penyiapan sarana dan prasarana kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- d. pelaksanaan pengaturan, pemeliharaan dan penggunaan barang-barang inventaris serta kendaraan dinas;
- e. pengoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan DPRD;

- f. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan/ ketertiban, dan kebersihan kantor dan keprotokolan;
- g. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- h. pengumpulan laporan tahunan kegiatan Sekretariat DPRD;
- i. peningkatan kompetensi sumber daya aparatur; dan
- j. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

## 2. BAGIAN PERSIDANGAN

Bagian Persidangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan rapat dan risalah, kegiatan komisi dan panitia, dan layanan aspirasi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Persidangan, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan rancangan jadwal kegiatan, rapat-rapat dan rencana kunjungan kerja DPRD;
- b. Pelaksanaan penyusunan notulen/risalah rapat-rapat yang dilaksanakan oleh DPRD;
- c. Pelaksanaan kegiatan komisi dan panitia;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pelayanan aspirasi masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

## 3. BAGIAN KEUANGAN

Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program, pengelolaan keuangan dan menyusun laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk pembayaran gaji dan tunjangan;
- c. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;

- d. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- e. pelaksanaan verifikasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### 4. BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Perundang-undangan, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan produk hukum, perpustakaan, pengelolaan data dan penyajian informasi dan publikasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Perundang-undangan mempunyai fungsi:

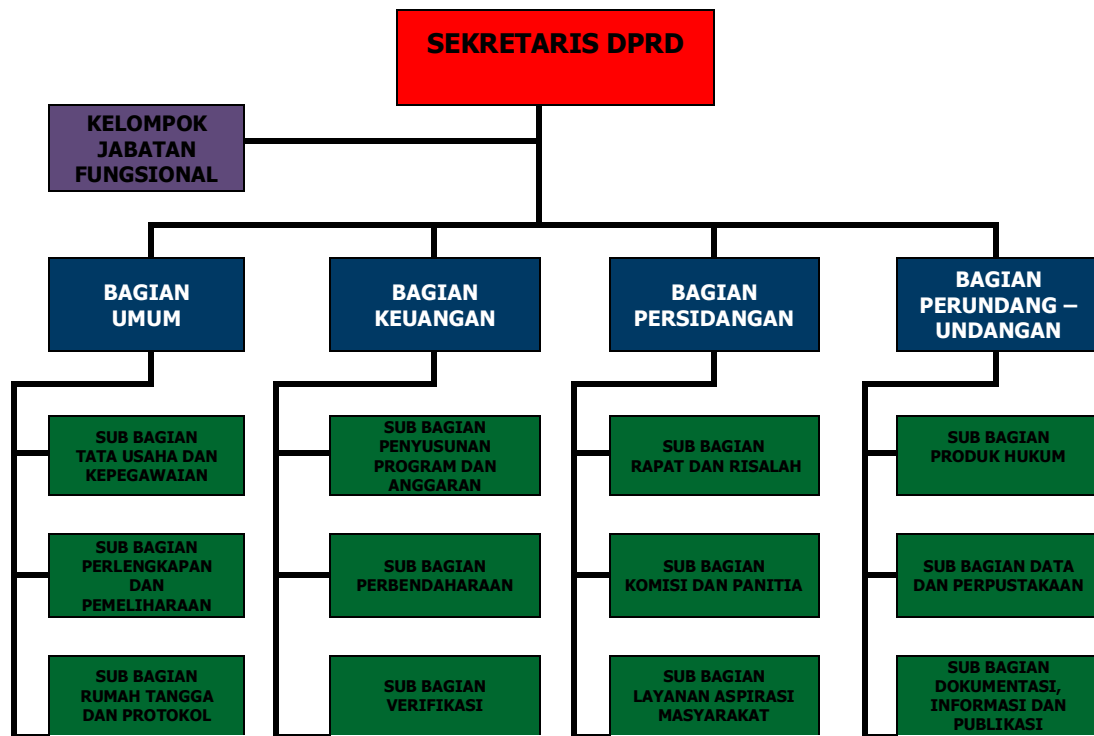
- a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan peraturan daerah dan produk hukum;
- b. Pelaksanaan penyimpanan produk hukum DPRD dan produk hukum lainnya;
- c. Pelaksanaan peliputan/pemberitaan dan publikasi serta pendokumentasian kegiatan DPRD;
- d. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan/analisis informasi;
- e. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan data kegiatan DPRD untuk media cetak dan elektronik;
- f. Pelaksanaan pengkajian, pengolahan data, informasi serta pengembangan informasi teknologi (IT) dan perpustakaan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### 5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL.

Selain susunan organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur terdiri dari 4 Bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang sesuai dengan bidang keahliannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Berdasarkan uraian diatas, maka Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

## Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia, asset/modal, dan unit usaha.

### a. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya Manusia yang mendukung tupoksi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur berjumlah 200 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kinerja (PTT-PK) dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2.2.1. Klasifikasi ASN dan PTT-PK Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur berdasarkan status Kepegawaian Tahun 2022

No	STATUS KEPEGAWAIAN	L	P	JUMLAH
1.	Aparatur Sipil negara	81	35	122
2.	Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian	51	15	78
				200

Tabel 2.2.2. Klasifikasi jumlah ASN dan PTT-PK setiap Bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur

No.	URAIAN	Jumlah Pegawai		Gender	
		ASN	PTT	L	P
1	Sekretaris DPRD	1	-	1	-
2	Bagian Umum	44	42	67	14
3	Bagian Persidangan	28	16	39	11
4	Bagian Perundang – undangan	18	7	19	6
5	Bagian Keuangan	23	6	18	19
	Jumlah	122	80	143	50

Tabel 2.2.3. Klasifikasi Aparatur Sipil Negara Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur berdasarkan golongan

No.	GOLONGAN	L	P	JUMLAH
1	Golongan IV			24
2	Golongan III			65
3	Golongan II			30
4	Golongan I			-
	JUMLAH			119

Klasifikasi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kinerja berdasarkan Pendidikan, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.4. Klasifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur berdasarkan tingkat Pendidikan

No.	PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH
1.	Strata 3	1	-	1
2.	Strata 2	13	13	26
3.	Strata 1	38	17	55
4.	Diploma 4	3	1	4
5.	Diploma 3	-	4	4
6.	Sekolah Menengah Atas /Sederajat	25	5	30
7.	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	-	-	0
8.	Sekolah Dasar/Sederajat	-	-	0
	JUMLAH	80	40	120

Tabel 2.2.5 Klasifikasi Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kinerja (PTT-PK) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur berdasarkan tingkat Pendidikan

No.	PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH
1.	Strata 2	-	-	0
2.	Strata 1	27	7	34
3.	Diploma 3	1	-	1
4.	Diploma 1	1	-	1
5.	Sekolah Menengah Atas	36	6	42
6.	Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	0
7.	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	-	-	0
8.	Sekolah Dasar/Sederajat	-	-	0
	JUMLAH	65	13	78

b. Sumberdaya Aset/Modal

Sumberdaya Aset/Modal yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur meliputi :

Tabel 2.2.6 Asset/Modal Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

No.	Kode Bidang	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan	Nilai (Rp)
1	01	Golongan Tanah	1	Bidang	82.124.000.000
2	0101	Tanah	1	Bidang	82.124.000.000
3	02	Golongan Peralatan dan Mesin	6.536	Buah/Set	47.364.794.679
4	0202	Alat-alat Besar	2	Buah/Set	610.230.500
5	0203	Alat – alat Angkutan	84	Buah	15.704.980.215
6	0204	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2	Buah	900.000
7	0205	Alat Pertanian	0	0	0
8	0206	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.705	Buah	24.135.636.264
9	0207	Alat Studio dan Alat Komunikasi	725	Buah	9.915.796.900
10	0208	Alat – alat Kedokteran	18	Buah	297.250.800
11	0209	Alat Laboratorium	0	Buah	0
12	0210	Alat – Alat Persenjataan/Keamanan	0	Buah	0
13	03	Golongan Gedung dan Bangunan	7	Buah	58.517.940.302
14	0311	Bangunan Gedung	6	Buah	58.468.399.052
15	0312	Monumen	1	Buah	49.541.250
16	04	Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan	6	Buah	525.508.500
17	0413	Jalan dan Jembatan	0	Buah	0
18	0414	Bangunan Air dan Irigasi	0	Buah	0
19	0415	Instalasi	1	Buah	149.435.000
20	0416	Jaringan	5	Buah	376.073.500
21	05	Golongan Asset Tetap Lainnya	7.350	Buah/Set/Ekor	1.488.921.875
22	0517	Buku dan Perpustakaan	7.215	Buah/Set	1.304.258.225
23	0518	Barang Bercorak Kebudayaan	133	Buah/Set	178.723.650
24	0519	Hewan Ternak Serta Tanaman	2	Ekor/Buah	5.940.000
25	06	Golongan Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	Buah	0
		<b>TOTAL :</b>			<b>190.021.165.356</b>

Sumber data : Sub Bagian Perlengkapan asset per 2020 (Desember 2020)

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai fasilitator dari tugas pokok dan fungsi DPRD ukuran keberhasilan kinerjanya berdasarkan tingkat keberhasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu unit kerja pendukung (supporting unit) dan unit koordinator (coordinating unit) dalam memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD. Jenis Pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan fungsi fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Provinsi Jawa Timur selama tahun anggaran 2019 s.d. 2024 secara sederhana dapat disampaikan sebagaimana Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Jawa Timur

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	-		-	-	78.5	81	82	83	84	85

Realisasi Capaian		Rasio Capaian		Keterangan
2022	2023	2022	2023	
8		9		10
82.32	83.91	104.12	100	

Capaian kinerja yang tergambar pada tabel 2.1 memperlihatkan tingkat pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa

Timur dalam memberikan pelayanan guna memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun (2015-2020), pada tahun 2019 terjadi penambahan 20 anggota DPRD dari periode sebelumnya sehingga anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 menjadi 120 orang sehingga beban kinerja staf Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur bertambah. Tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan target Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya. Secara terperinci evaluasi pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD berdasar Renstra ditunjukkan pada Tabel 2.6 yang berisi Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.

Dari tabel diatas diketahui bahwa target kinerja ditahun 2016 hingga tahun 2019 angka kenaikan target indikator kinerja utama stabil di angka 1 dengan rasio capaian kinerja yang variatif setiap tahunnya. Namun demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tersebut secara keseluruhan memperoleh angka melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat pada perolehan capaian nilai IKM di setiap tahun mulai dari tahun 2016 s.d 2020 telah melampau target yang ditetapkan di akhir Renstra. Hal ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD dengan adanya upaya yang sungguh-sungguh oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam memberikan layanannya guna mendukung kinerja DPRD.

Setiap evaluasi, masukan dan rekomendasi dari anggota DPRD terhadap hasil IKM setiap tahunnya akan menjadi dasar/acuan bagi Sekretariat DPRD untuk berintropeksi dalam meningkatkan kinerjanya.

Adapun proyeksi keuangan selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.729.883.600,00	-	-	-	-	-	9.099.519.374,00	-	-	-	-	-	0.85	-	-	-	-	-	-	84,81%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	40.623.512.510,00	-	-	-	-	-	36.342.076.594,00	-	-	-	-	-	0.89	-	-	-	-	-	-	89,39%
3.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	11.970.977.750,00	-	-	-	-	-	9.637.470.447,00	-	-	-	-	-	0.80	-	-	-	-	-	-	80,15%
4.	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	2.708.418.936,00	-	-	-	-	-	194.371.650,00	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	7,18%
5.	Program Layanan Persidangan	115.210.197.500,00	-	-	-	-	-	78.274.535.150,00	-	-	-	-	-	0.68	-	-	-	-	-	-	67,94%
6.	Program Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	100.119.263.704,00	-	-	-	-	-	55.939.245.331,00	-	-	-	-	-	0.56	-	-	-	-	-	-	55,87%
7.	Program pendukung Layanan Administrasi Umum	-	81.227.302.352,00	-	-	-	-	-	67.905.911.845,00	-	-	-	-	-	0.84	-	-	-	-	-	83,60%
8.	Program pendukung Layanan Administrasi Keuangan	-	3.880.491.000,00	-	-	-	-	-	3.559.610.373,00	-	-	-	-	-	0.91	-	-	-	-	-	91,37%
9.	Program Layanan Persidangan	-	136.261.635.000,00	-	-	-	-	-	117.301.542.588,00	-	-	-	-	-	0.86	-	-	-	-	-	86,09%
10.	Program Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	-	87.362.366.908,00	-	-	-	-	-	76.455.418.116,00	-	-	-	-	-	0.87	-	-	-	-	-	87,52%
11.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	-	-	251.344.649.121,00	271.111.164.982,00	227.019.432.700,00	234.268.861.700,00	-	-	116.466.756.837,00	252.482.050.802,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi	-	-	156.954.663.008,00	352.484.602.513,00	225.295.255.795,00	225.295.255.795,00	-	-	231.148.916.597,00	299.459.728.499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dari tabel 2.2 diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran mencapai xxx% dan realisasi anggaran rata-rata mencapai 80%. Rata-rata pertumbuhan anggaran menunjukkan bahwa tiap tahun frekuensi kegiatan DPRD semakin meningkat. Disamping itu dampak perubahan regulasi daerah juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anggaran. Sedangkan Peraturan Daerah yang dihasilkan sebagai salah satu output kinerja DPRD setiap tahunnya juga sangat berpengaruh terhadap kebutuhan anggaran guna memfasilitasi dan mendukung kinerja DPRD. Perolehan angka realisasi anggaran mencapai 80% dipengaruhi antara lain :

- a. Adanya pandemi COVID pada Tahun 2019 yang telah menyebar di seluruh dunia dimana banyak negara terserang penyakit ini sampai menghadapi tingkat kematian dan kerugian ekonomi yang cukup tinggi. Pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan angka pengangguran juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Banyak masyarakat yang mengeluh dan terhenti aktivitasnya karena pandemi Covid-19. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi Covid-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian.

Prioritas utama Pemerintah saat ini ialah kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Untuk itu Kemenkeu telah membuat peraturan yang mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan refocusing anggaran untuk tujuan penanganan Covid-19 sesuai dengan Ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional menginstruksikan kepada Pemerintah

Daerah untuk melakukan Penyesuaian Penerimaan PAD dengan menyesuaikan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.

- b. Tahun 2021 masih merupakan sebuah tahun yang berat dengan adanya terpaan wabah Virus Covid-19 yang tak juga usai. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, APBN/APBD mengalami realokasi dan refocusing besar-besaran guna membangun jaring pengaman sosial demi meminimalisir dampak sosial, kesehatan dan ekonomi dari pandemi COVID-19. Dampak bagi setiap OPD, termasuk Sekretariat DPRD, adalah pengurangan anggaran untuk kegiatan yang tidak terkait kesehatan masyarakat dan jaring pengaman sosial. Program dan kegiatan yang telah direncanakan di akhir tahun 2020 untuk bisa dilaksanakan selama tahun 2021 harus dihapus maupun ditunda pelaksanaannya. Maka dari itu perlu dilakukan perubahan rencana kerja karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343.
- c. Alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

- d. Permasalahan anggaran di Sekretariat DPRD juga berkaitan dengan belum dimilikinya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk tiap Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatif maupun akademik dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Kegiatan hearing/dialog yang seharusnya dilakukan dengan melibatkan masyarakat (tokoh agama dan masyarakat) cukup dilakukan hanya dengan tim ahli dan melalui media elektronik saja sangat berpengaruh terhadap serapan anggaran.
- f. Adanya beberapa anggota yang tidak mengambil dana kegiatan reses atau dana reses hanya diambil beberapa titik saja sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap serapan anggaran.
- g. Adanya selektifitas penggunaan anggaran dengan mempedomani asas kepatutan dan kewajaran pada harga-harga makanan dan minuman, snack dan sewa tempat pada kegiatan reses sehingga sangat berpengaruh pada serapan anggaran.
- h. Adanya selektifitas terhadap kegiatan kursus/pelatihan/ bimbingan teknis yang diikuti oleh anggota DPRD juga dianggap sangat berpengaruh terhadap serapan anggaran.
- i. Pada Tahun 2019 rasio realisasi dan anggaran hanya 69.78% dikarenakan tahun 2019 adalah tahun politik, sehingga banyak kegiatan yang belum bisa direalisasikan, sebagai contoh : pada pelaksanaan kegiatan reses yang seharusnya dilaksanakan 3x dalam satu tahun tetapi pelaksanaan kegiatan reses pada hanya dilaksanakan 2x dalam Tahun 2019, dengan pelaksanaan 1x pada Triwulan 1 dan 1x pada Triwulan IV (sesudah pemilihan anggota dewan periode 2019 – 2024), hal ini sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Efisiensi anggaran akan selalu dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dengan meningkatkan kinerjanya sebagaimana tupoksi yang dijalankan.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Kajian/analisa tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap dukungan kinerja DPRD masih dalam kategori “baik tapi perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya” merupakan tantangan bagi Perangkat Daerah agar terus berpacu dalam meningkatkan kinerjanya, namun demikian terdapat permasalahan–permasalahan yang terkait dengan pengembangan pelayanan dan dukungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur antara lain:

1. Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD perlu dikembangkan dan dibina menjadi tim yang solid sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Perlunya motivasi kerja dalam rangka pengembangan SDM yang bervariasi;
3. Penyusunan Target Kinerja yang Terukur serta penilaian Kinerja yang rasional dan proposional dalam kaitannya dengan peningkatan pelayanan sehingga memberikan rasa nyaman dan puas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. Pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
5. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;
6. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan target kinerja DPRD Provinsi Jawa Timur karena Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur hanya berfungsi memfasilitasi kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur sehingga bertambah atau menurunnya target kinerja DPRD terhadap jumlah Peraturan Daerah bukan menjadi kewenangan Sekretariat DPRD.

Pada bagian ini ditinjau kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah hanya ditinjau dari gambaran pelayan Perangkat Daerah yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur antara lain yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kapabel dibidangnya;
2. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja guna mengoptimalkan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD ;
4. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi dengan menerapkan Pemerintahan yang CETTAR (Cepat, Tanggap, Transparan dan Responsif).

# **BAB 3**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Sekretariat DPRD merupakan merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD menjembatani DPRD dan Pemerintah Provinsi dalam proses legislasi. DPRD yang mempunyai fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi merupakan bagian dari internal Sekretariat DPRD dalam menghasilkan produk hukum daerah. Di dalam pelaksanaannya DPRD melalui alat kelengkapannya akan melakukan proses persiapan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan produk hukum.

Selain itu dalam proses menampung aspirasi dalam rangka mengumpulkan data dan informasi dalam pembahasan raperda, proses sosialisasi peraturan daerah memerlukan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mendampingi DPRD turun ke lapangan menemui konstituennya di daerah pemilihan masing-masing terutama melalui hasil reses dan musrenbang.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur menjadi fasilitator yang menjembatani antara eksekutif dan legislatif dalam rangka proses persiapan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan produk hukum daerah yang dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.5. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah	
1	2	3	
Belum optimalnya pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	Tingginya standar pelayanan yang diinginkan (ekspektasi) anggota DPRD dan semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan	Pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan sebenarnya sudah sesuai dengan prosedur yang ada, akan tetapi kadang-kadang di lapangan masih ditemui beberapa kendala misalnya bahan untuk rapat anggota dewan masih menunggu dari instansi lain, sehingga pelayanan juga agak terhambat	
		Kualitas makanan dan minuman agar ditingkatkan, terutama variasi makanan yang lebih variatif	
		Pelayanan pada masa reses masih belum optimal	
		Kecepatan dan ketepatan pembayaran gaji dan tunjangan masih belum optimal	
	Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia	Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia	Penyimpanan produk Hukum Daerah sebaiknya dilakukan secara digital dan bisa diakses banyak pihak, disamping itu juga disimpan dalam bentuk manual dan dibagikan pada instansi terkait serta daerah tingkat dua
			Kegiatan anggota DPRD sebaiknya segera diinformasikan kepada media cetak maupun media elektronik sehingga masyarakat bisa mengetahui kegiatan anggota DPRD
			Sebaiknya Sekretariat DPRD memiliki Web yang akan berfungsi untuk menyebarkan informasi secara on line dengan konten yang selalu diperbaharui
	Belum optimal pemanfaatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Belum optimal pemanfaatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Lahan Parkir yang kurang memadai pada waktu rapat paripurna atau rapat-rapat yang lain
			Belum tersedianya Nursery room dan play ground sesuai perda
			Kurang ketersediaan tissue toilet

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi, Misi, serta program Gubernur dan wakil gubernur terpilih yang berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur tersebut, ditempuh melalui 4 (empat) misi yang terdiri atas :

- a. Misi 1 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
- b. Misi 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan memperhatikan Kelompok yang rentan;
- c. Misi 3 : Tata kelola Pemerintahan yang bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan;
- d. Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Sosial dan Ruang Budaya.

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dan berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur adalah Misi Ketiga, yaitu :

“Tata kelola Pemerintahan yang bersih, Inovatif, Terbuka Partisipatoris Memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan” .

Memperhatikan Janji Politis (Nawa Bhakti) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2019-2024, yaitu :

1. Jatim Sejahtera : Mengentaskan kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial;

2. Jatim Kerja : Memperluas lapangan Pekerjaan dan membangun keunggulan Ekonomi;
3. Jatim Cerdas & Sehat : Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas;
4. Jatim Akses : Membangun Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan;
5. Jatim Berkah : Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur & Berintegritas;
6. Jatim Agro : Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan;
7. Jatim Berdaya : Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
8. Jatim Amanah : Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi dengan menerapkan Pemerintahan yang CETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan dan Responsif);
9. Jatim Harmoni : Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.

Keterkaitan Misi dengan Nawa Bhakti Satya berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur adalah :

**Jatim Amanah** : Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi dengan menerapkan Pemerintahan yang CETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan dan Responsif).

Indikator sasaran RPJMD akan dituangkan dalam tujuan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yaitu **"Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD"** dengan indikator tujuan : "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD" dapat dilihat dalam kurun waktu 5 tahun dengan target sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	81	82	83	84	85

Jika pada tahun 2019 dan 2020 indikator tujuan tersebut di atas dilaksanakan melalui :

a. 2 (dua) program utama yaitu :

1. Program layanan persidangan; dan
2. Program layanan penyusunan peraturan perundang-undangan.

b. 2 (dua) Program Pendukung yaitu :

1. Program pendukung layanan administrasi umum kesekretariatan DPRD;
2. Program pendukung layanan administrasi keuangan kesekretariatan DPRD;

Maka pada Tahun 2021, berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Program di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur menjadi :

- 1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD;**
- 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.**

Terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem Perencanaan terutama untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, selain harus mempedomani program atau kegiatan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga harus sudah mengakomodir kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur tidak ada ketugasan dan fungsi yang berhubungan langsung dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian/Lembaga Teknis di Pemerintah Pusat. Di lain pihak, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur tidak memiliki alur tugas maupun koordinasi langsung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Apabila dikaitkan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota tidak memiliki jalur hirarki yang mewajibkan semua urusan di Kabupaten/Kota menjadi urusan Provinsi dalam memfasilitasi DPRD secara Undang-undang maupun Urusan. Berdasarkan hal tersebut maka Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 tidak menjabarkan Telaahan Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur tidak ada ketugasan dan fungsi yang berhubungan langsung dengan kebijakan dalam Tata Ruang Wilayah maupun Kajian Lingkungan Hidup. Berdasarkan hal tersebut maka Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 tidak menjabarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Identifikasi terhadap lingkungan Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur menghasilkan faktor-faktor Strategis sebagai berikut:

#### **A. Faktor Internal**

##### **1. Kekuatan :**

- a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai;
- b. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;

- c. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD;
- d. Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## **2. Kelemahan :**

- a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal;
- b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia
- d. Layanan Sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja DPRD masih kategori baik tapi masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya. Hal ini tentunya akan memacu Sekretariat DPRD dalam melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan.

## **B. Faktor Eksternal**

### **1. Peluang :**

- a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD;
- b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;
- c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan;
- d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya;
- e. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

### **2. Ancaman/Tantangan :**

- a. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah;

- b. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD;
- c. Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior ;
- d. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.

### **C. Pilihan Langkah Strategis**

#### **Langkah Strategis S – O**

1. Penuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD, pemanfaatan anggaran yang tersedia serta pemanfaatan perkembangan iptek dan tenaga ahli.
2. Manfaatkan hubungan harmonis dengan DPRD, peluang serta adanya tata tertib dan kode etik DPRD untuk mewujudkan pelayanan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara prima.

#### **Langkah Strategis S - T**

1. Jadikan keberadaan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD sebagai wahana untuk mengatasi masih seringnya campur tangan pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal dan untuk perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD;
2. Optimalkan kedudukan Sekretariat DPRD yang strategis untuk mengantisipasi seringnya terjadi perubahan kebijakan dan opini inferior terhadap institusi.

#### **Langkah Strategis W - O**

1. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

2. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.

### **Langkah Strategis S - W**

1. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
2. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

### **D. Faktor- faktor Kunci keberhasilan**

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical succes factors*) merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu dengan menganalisis lingkungan Strategis organisasi melalui pendekatan analisis SWOT/TOWS.

Dengan mempergunakan pendekatan analisis SWOT/TOWS terhadap faktor-faktor Strategis tersebut, maka dapat ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;

2. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
3. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

# **BAB 4**

## **TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi kepala daerah dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 tujuan ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :

**“Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka Sekretariat DPRD menetapkan sasaran yang ingin dicapai adalah :

**“Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan fungsinya”.**

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dapat disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA UTAMA PADA TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	<b>TUJUAN :</b> Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas /kinerja DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	81	82	83	84	85
2.	<b>SASARAN :</b> Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD					

Dari tabel di atas dirumuskan bahwa indikator tujuan dan indikator sasaran adalah sama yang menjadi indikator kinerja utama Perangkat Daerah yaitu indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD dengan target indikator kinerja utama di akhir Renstra Tahun 2019-2024 sebesar 85.

## **BAB 5**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah dalam setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, ditetapkan berdasarkan :

1. Pengkajian sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang;
2. Pengkajian gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan pembangunan, serta isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk strategi yang akan dipilih

Arah dan kebijakan, dirumuskan dengan menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, memperjelas strategi sehingga lebih focus, konkrit dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target dan sasaran. Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<p>Visi : Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera Unggul dan berahlak dengan tata kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong</p>			
<p>Misi 3 : Tata kelola Pemerintahan yang bersih, Inovatif, Terbuka Partisipatoris Memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan</p>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<p>Meningkatkan Dukungan bagi Peningkatan Kapasitas/ Kinerja DPRD</p>	<p>Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD terhadap Peran DPRD sesuai dengan fungsinya</p>	<p>1. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan</p>	<p>1. Peningkatan daya tanggap dan ketepatan pelayanan kepada DPRD</p>
		<p>2. Meningkatkan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya</p>	<p>2. Peningkatan kapasitas kelembagaan Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya</p>
		<p>3. Menjadikan keberadaan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta terjalinnya hubungan harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD</p>	<p>3. Peningkatan tertib administrasi kesekretariatan DPRD</p>
		<p>4. Meningkatkan kualitas layanan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja DPRD</p>	<p>4. Peningkatan kualitas Layanan bagi Peningkatan Kapasitas/ Kinerja DPRD</p>

# **BAB 6**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **6.1 Rencana Program**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses pencapaian visi misi daerah, karena dalam perencanaan tersebut terdapat kegiatan, tahapan, maupun strategi dalam mencapai *ultimate* target pembangunan daerah yang tertuang dalam visi dan misi daerah. Dalam konteks nasional, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan PP No 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan nasional memberikan kriteria bahwa untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sinkron dengan pelaksanaan penganggaran.

Penganggaran juga memegang peranan penting sebagai *essential tools* untuk menjadikan perencanaan tersebut terlaksana. Oleh karena itu, antara perencanaan pembangunan dan penganggaran harus selaras sehingga perencanaan dapat terlaksana secara optimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (“Permendagri No 70 Tahun 2019”) menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah. Oleh karena itu perencanaan yang baik merupakan inti dari pengelolaan keuangan yang efektif. Pemerintah daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran yang dimiliki tidak baik.

Dokumen RKPD dan APBD merupakan dokumen perencanaan dan anggaran yang saling berkaitan. Oleh karena itu, dalam membahas APBD perlu menekankan

pada sinkronisasi antara dokumen APBD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Disamping perencanaan, penganggaran juga mengambil porsi penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya *output* dari perencanaan adalah penganggaran.

Implementasi teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membuat perbedaan kode dan nama program kegiatan di daerah yang menyebabkan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri selaku pembina umum daerah kesulitan dalam menghitung capaian pelaksanaan program daerah secara nasional maka berdasarkan pemikiran ini terbitlah Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 memiliki arti penting dalam melakukan sinkronisasi antara kelembagaan, manajemen, perencanaan, dan penganggaran urusan pemerintahan konkruen antara pemerintah pusat dan daerah sebagai wujud dari sinergitas perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah melakukan rencana kerja pemerintah daerah.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Permendagri No 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Seiring dengan perubahan RPJMD di tahun 2019, dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan mempedomani Permendagri 90 Tahun 2019 maka Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 mempunyai 2 (dua) program utama yaitu :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
2. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Capaian pengukuran kinerja terhadap 2 program yang sudah terbagi sesuai dengan peran dan fungsinya tersebut digunakan untuk merencanakan target dan mengevaluasi realisasi capaian yang ingin diperoleh secara maksimal beserta pengendaliannya 2 (dua) program ini diharapkan menjadi lebih baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD sehingga dapat lebih menformulasikan visi dan misi Gubernur lebih harmoni, sinergi dan terukur di setiap kinerjanya.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Oleh karena itu, sebelum mengarah dalam penjabaran lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan perlu dilakukan sinkronisasi antara tujuan, sasaran, dan strategi dengan kenaikan anggaran  $\pm 10\%$  setiap tahunnya, sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan 2019**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi			
							Tahun-1 2015		Tahun-2 2016		Tahun-3 2017		Tahun-4 2018		Tahun-5 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja DPRD	Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD		<b>Program 01</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kenyamanan Kantor	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>14.606.799.900</b>	<b>71%</b>	<b>17.504.003.897</b>	<b>72%</b>	<b>14.606.799.900</b>	<b>73%</b>	<b>8.523.184.725</b>	<b>74%</b>	<b>9.162.423.579</b>	<b>74%</b>						
				<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																			
				Kegiatan 01.019		OUTPUT: Jumlah dokumen keuangan, Jumlah Premi Asuransi, Jumlah Uji Laboratorium	5,3,1	5,3,1	14.606.799.900	5,3,1	17.504.003.897	5,3,1	14.606.799.900	73%	8.523.184.725	74%	9.162.423.579	74%					
				Pelaksanaan Administrasi perkantoran		Tahun 2018-2019 berubah menjadi : Persentase Pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran																	
				<b>Program 02</b>	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>16.419.374.200</b>	<b>100%</b>	<b>14.232.955.426</b>	<b>100%</b>	<b>28.559.500.806</b>	<b>100%</b>	<b>17.315.219.816</b>	<b>100%</b>	<b>18.721.361.302</b>	<b>100%</b>						
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																					
				Kegiatan 02.012	OUTPUT: Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	30 Unit	36 Unit	7.525.000.000	32 Unit	4.338.000.000	27 Unit	19.058.000.000	33 Unit	11.936.100.500	35 Unit	12.936.100.500	35 Unit						
				Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Tahun 2018-2019 berubah menjadi : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan																		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun-1 2015		Tahun-2 2016		Tahun-3 2017		Tahun-4 2018		Tahun-5 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					sarana yang tersedia																
					Kegiatan 02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	OUTPUT: Jumlah Peralatan dan Perengkapan Sarana dan Prasarana yang dipelihara	3 Gdg, 95 Kend	3 Gdg 95 Kend	8.894.374.200	3 Gdg 95 Kend	9.894.955.426	3 Gdg 95 Kend	9.501.500.805	3 Gdg 95 Kend	5.379.119.316	3 Gdg 95 Kend	5.785.260.802	3 Gdg 95 Kend			
					<b>Program 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi</b>	60%	60%	<b>14.935.620.960</b>	61%	<b>15.603.689.589</b>	62%	<b>15.964.440.363</b>	63%	<b>10.831.566.259</b>	64%	<b>11.643.933.729</b>	64%			
					Kegiatan 07.01 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	OUTPUT : Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	15 Keg	15 Keg	12.291.035.960	15 Keg	12.823.746.637	15 Keg	13.084.855.156	15 Keg	2.806.999.590	15 Keg	3.306.999.590	15 Keg			
					Tahun 2018-2019 berubah menjadi : Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Tahun 2018-2019 berubah menjadi : Jumlah Konsultasi															
					Kegiatan 07.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	OUTPUT: Jumlah kegiatan peningkatan Kapasitas SDM	5 Keg	5 Keg	2.644.585.000	5 Keg	2.779.942.952	5 Keg	2.879.585.207	10	8.024.566.669	10	8.336.934.139	10			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1 2015		Tahun-2 2016		Tahun-3 2017		Tahun-4 2018		Tahun-5 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Tahun 2018-2019 berubah menjadi: Pembinaan Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah	Tahun 2018-2019 berubah menjadi : 1. Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 2. Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM								240		240		240			
				<b>Program 08</b> <b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu</b>	100%	100 %	<b>5.317.346.766</b>	<b>100 %</b>	<b>5.498.367.168</b>	<b>100 %</b>	<b>5.948.203.884</b>	<b>100 %</b>	<b>4.303.160.225</b>	<b>100 %</b>	<b>4.733.397.242</b>	100 %			
				Kegiatan 08.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan	OUTPUT: Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	5 Dok	5 Dok	1.710.204.030	5 Dok	1.849.510.150	5 Dok	1.984.461.165	5 Dok	1.441.843.000	5 Dok	1.662.080.017	5 Dok			
				Kegiatan 08.02 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	OUTPUT: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pelaporan  Tahun 2018-2019 berubah menjadi : Jumlah Dokumen pelaporan yang tersusun	3 Dok	5 Dok	3.607.142.736	3 Dok	3.648.857.018	3 Dok	3.963.742.719	3 Dok	2.861.317.225	3 Dok	3.071.317.225	3 Dok			
				Program 15	Jumlah Raperda yang ditetapkan bersama oleh	4	4	<b>93.682.653.234</b>	<b>4</b>	<b>103.401.632.832</b>	<b>4</b>	<b>113.841.796.116</b>								

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1 2015		Tahun-2 2016		Tahun-3 2017		Tahun-4 2018		Tahun-5 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	DPRD dan Kepala Daerah															
				Kegiatan 15.01 Pembahasan rancangan peraturan daerah	OUTPUT: Jumlah kegiatan pembahasan Raperda	45 Kali	45 Kali	21.150.000.000	60 Kali	22.460.000.000	60 Kali	24.136.000.000								
				Kegiatan 15.02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	OUTPUT: Jumlah Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	80 Kali	85 Kali	21.300.000.000	85 Kali	22.210.000.000	85 Kali	24.587.796.116								
				Kegiatan 15.03 Rapat-rapat dan hearing/ dialog Alat Kelengkapan Dewan	OUTPUT: Jumlah Kegiatan Rapat2 Hearing/dialog AKD	126 Kali	126 Kali	1.953.735.000	126 Kali	2.449.108.500	126 Kali	2.364.019.350								
				Kegiatan 15.04 Rapat-rapat Paripurna	OUTPUT: Jumlah agenda kegiatan rapat-rapat paripurna	153 Kali	153 Kali	6.990.141.734	140 Kali	7.818.237.350	140 Kali	8.600.061.085								
				Kegiatan 15.04 Kegiatan Reses	OUTPUT: Jumlah Kegiatan Reses	3 Kali	3 Kali	18.000.000.000	3 Kali	19.490.000.000	3 Kali	21.169.000.000								
				Kegiatan 15.06 Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah	OUTPUT: Jumlah Kunjungan Kerja DPRD	80 Kali	80 Kali	3.300.000.000	80 Kali	4.510.000.000	80 Kali	4.961.000.000								
				Kegiatan 15.07	OUTPUT: Jumlah kegiatan pendalaman	38 Kali	40 Kali	12.052.011.500	45 Kali	14.282.212.650	50 Kali	17.210.433.915								

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun-1 2015		Tahun-2 2016		Tahun-3 2017		Tahun-4 2018		Tahun-5 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	tugas pimpinan dan anggota DPRD																
				Kegiatan 15.08 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	OUTPUT: Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, pemerintah daerah dan stakeholder	30 Kali	30 Kali	2.875.000.000	30 Kali	3.162.500.000	40 Kali	3.478.750.000									
				Kegiatan 15.26 Publik Hearing Rancangan Peraturan Perundang – undangan	OUTPUT: Jumlah kegiatan public hearing rancangan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	2 Kali	5 Kali	1.380.000.000	5 Kali	1.769.632.832	10 Kali	1.669.800.000									
				Kegiatan 15.27 Publikasi Kegiatan DPRD	OUTPUT: Jumlah publikasi kegiatan DPRD	310 Kali	340 Kali	4.681.765.000	360 Kali	5.249.941.500	375 Kali	5.664.935.650									
				Program 16 Program Layanan Persidangan	Indeks Kepuasan Masyarakat DPRD Terhadap Layanan Persidangan								77,5	67.567.703.320	78,5	68.412.031.200	78,5				
				Kegiatan 16.01 Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	OUTPUT: Jumlah Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama								90 kali	28.325.547.030	85 kali	28.475.874.910	85 kali				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun-1 2015		Tahun-2 2016		Tahun-3 2017		Tahun-4 2018		Tahun-5 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Kegiatan 16.02 Rapat-rapat dan hearing/ dialog Alat Kelengkapan Dewan	OUTPUT: Jumlah Kegiatan Rapat2 Hearing/dialog AKD								126 kali	1.991.420.000	110 kali	2.191.420.000	110 kali				
				Kegiatan 16.03 Rapat-rapat Paripurna	OUTPUT: Jumlah agenda kegiatan rapat-rapat paripurna								140 kali	4.566.910.000	90 kali	4.866.910.000	90 kali				
				Kegiatan 16.04 Kegiatan Reses	OUTPUT: Jumlah Kegiatan Reses								3 kali	25.377.046.290	2 kali	25.377.046.290	2 kali				
				Kegiatan 16.05 Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah	OUTPUT: Jumlah Kunjungan Kerja DPRD								85 kali	7.306.780.000	80 kali	7.500.780.000	80 kali				
				<b>Program 17 Program Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat DPRD Terhadap Layanan Penyusunan Perundang-undangan</b>								<b>77,5</b>	<b>58.824.646.680</b>	<b>78,5</b>	<b>59.133.868.800</b>	<b>78,5</b>				
				Kegiatan 17.01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	OUTPUT: Jumlah kegiatan pembahasan Raperda								60 kali	24.272.913.595	60 kali	24.294.998.100	60 kali				
				Kegiatan 17.02 Penguatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	OUTPUT: Jumlah kegiatan pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD								55 kali	24.988.845.585	50 kali	24.988.560.700	50 kali				
				Kegiatan 17.03 Sosialisasi Peraturan	OUTPUT: Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-								16 kali	4.042.800.000	16 kali	4.134.240.000	16 kali				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun-1 2015		Tahun-2 2016		Tahun-3 2017		Tahun-4 2018		Tahun-5 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Perundang-undangan	undangan yang akan disosialisasikan																
				Kegiatan 17.04 Publikasi Hearing Rancangan Peraturan Perundang-undangan	OUTPUT: Jumlah kegiatan public hearing rancangan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan								6 kali	1.146.462.500	6 kali	1.217.170.000	6 kali				
				Kegiatan 17.05 Publikasi Kegiatan DPRD	OUTPUT: Jumlah publikasi kegiatan DPRD								390 kali	3.873.625.000	410 kali	3.998.900.000	410 kali				
				Kegiatan 17.06 Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Perpustakaan	OUTPUT : 1. Jumlah dokumen kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD; 2. Jumlah literatur perpustakaan yang disediakan								36 190	500.000.000	36 200	500.000.000	36 200				

**Tabel 6.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan 2020**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja DPRD	Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	81	81	182.802.664.867															
			Program Pendukung Layanan Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat / Aparatur terhadap Layanan Administrasi Umum Kesekretariatan DPRD	81	81	22.579.796.060															
			Kegiatan Ketatausahaan dan Kepegawaian	OUTPUT: 1. Prosentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran  2. Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal  3. Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	100 %  10  450	100 %  10  450	2.225.610.000															
			Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan	OUTPUT: Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana yang dipelihara	81	81	16.571.628.060															
			Kegiatan Kerumahtangaan dan Protokol	OUPUT: Prosentase masyarakat/aparatur yang puas terhadap pelayanan perkantoran	81	81	3.782.558.000															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Program Pendukung Layanan Administrasi Keuangan Kesekretariatan DPRD	Prosentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah yang disusun tepat waktu	81	81	18.627.676.000												
			Kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	OUTPUT: Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	100	100	2.735.740.000												
			Kegiatan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran	OUTPUT: Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	48	48	14.382.486.000												
			Kegiatan Monitoring, tindaklanjut hasil pemeriksaan program, kegiatan dan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD	OUTPUT: Jumlah dokumen pelaporan yang dievaluasi dan ditindaklanjuti	4	4	1.509.450.000												
			Program Layanan Persidangan	Indeks kepuasan masyarakat (DPRD) terhadap layanan persidangan	81	81	74.504.290.807												
			Kegiatan Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat /tokoh agama, rapat alat kelengkapan dewan dan kunjungan kerja DPRD	OUTPUT: 1. Prosentase rapat AKD yang dilaksanakan sesuai SOP 2. Prosentase kunjungan kerja DPRD yang dilaksanakan sesuai SOP	81 81	81 81	40.511.770.807												
			Kegiatan Rapat-rapat Paripurna	OUTPUT: Frekuensi Rapat paripurna yang diselenggarakan sesuai jadwal Banmus	120	120	2.951.200.000												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Karya PD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kegiatan Reses	OUTPUT: 1. Jumlah dokumen hasil reses yang dilaporkan tepat waktu 2. Prosentase pengaduan/aspirasi masyarakat hasil reses yang ditindaklanjuti	3 81	3 81	31.041.320.000												
			Program Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	81	81	67.090.902.000												
			Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Penguatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	OUTPUT: 1. Jumlah Kegiatan Pembahasan Raperda yang dilaksanakan 2. Prosentase anggota DPRD yang mengikuti penguatan kapasitas DPRD sesuai dengan fungsinya 3. Jumlah Publik Hearing Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD yang sesuai SOP	10 50% 10	10 50% 10	57.476.522.000												
			Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	OUTPUT: 1. Prosentase sosialisasi Perda DPRD yang dilaksanakan tepat waktu 2. Prosentase berita dan hasil liputan yang dipublikasikan			8.571.700.000												
			Kegiatan Penyusunan dan Pengolahan data dan Perpustakaan	OUTPUT: 1. Prosentase data wajib yang disediakan			1.042.650.000												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				2. Jumlah kunjungan perpustakaan															

**Tabel 6.3. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan 2021**  
(Sesuai dengan PMD 90 tahun 2019 dan KEMENDAGRI 050 tahun 2020)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Loka	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		402	Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur															
<b>TUJUAN</b>																		
Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja DPRD		4.02.01		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	81	82	438.299.164.495	83	444.218.447.495					85	444.218.447.495			
<b>SASARAN</b>																		
Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya		4.02.01		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	81	82	438.299.164.495	83	444.218.447.495					85	444.218.447.495			
		4.02.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kepuasan masyarakat (DPRD) terhadap pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	81	82	230.946.506.475	83	223.245.508.295	84	223.245.508.295	85	225.295.255.795		225.295.255.795			
				Persentase indikator program yang tercapai														
				Persentase realisasi anggaran														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Loka
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Indeks profesionalitas ASN													
		4.02.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dok	1 Dok	2.954.720.000	1 Dok	4.652.378.400	1 Dok	4.652.378.400	1 Dok	4.652.378.400		4.652.378.400		
		4.02.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	11 Dok	11 Dok	1.221.560.000	7 Dok	1.816.823.800	7 Dok	1.816.823.800	11 Dok	1.816.823.800		1.816.823.800		
		4.02.01.101.02	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1 Dok	1 Dok	1.181.170.000	1 Dok	1.170.193.800	1 Dok	1.170.193.800	1 Dok	1.170.193.800		1.170.193.800		
		4.02.01.101.101.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 Dok	1 Dok	133.320.000	1 Dok	200.440.000	1 Dok	200.440.000	1 Dok	200.440.000		200.440.000		
		4.02.01.101.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1 Dok	1 Dok	95.320.000	1 Dok	222.440.000	1 Dok	222.440.000	1 Dok	222.440.000		222.440.000		
		4.02.01.101.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1 Dok	1 Dok	77.320.000	1 Dok	279.440.000	1 Dok	279.440.000	1 Dok	279.440.000		279.440.000		
		4.02.01.101.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	5 Dok	5 Dok	49.820.000	5 Dok	96.440.000	5 Dok	96.440.000	5 Dok	96.440.000		96.440.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Loka
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4.02.01.101.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	4 Dok	4 Dok	196.210.000	4 Dok	866.600.800	4 Dok	866.600.800	4 Dok	866.600.800	4 Dok	866.600.800		
		4.02.01.102.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Lap	12 lap	41.853.567.627	12 lap	43.133.238.000	12 lap	43.133.238.000	12 lap	43.133.238.000	12 lap	43.133.238.000		
		4.02.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	12 Lap	12 lap	34.077.980.000	12 lap	34.357.980.000	12 lap	34.357.980.000	12 lap	34.357.980.000	12 lap	34.357.980.000		
		4.02.01.102.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Lap	12 lap	7.552.998.000	12 lap	8.270.878.000	12 lap	8.270.878.000	12 lap	8.270.878.000	12 lap	8.270.878.000		
		4.02.01.102.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	12 Lap	12 lap	60.460.000	12 lap	304.960.000	12 lap	304.960.000	12 lap	304.960.000	12 lap	304.960.000		
		4.02.01.102.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akutansi perangkat daerah	12 Lap	12 lap	42.482.000	12 lap	42.480.000	12 lap	42.480.000	12 lap	42.480.000	12 lap	42.480.000		
		4.02.01.102.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD	2 Lap	2 lap	44.320.000	2 lap	44.320.000	2 lap	44.320.000	2 lap	44.320.000	2 lap	44.320.000		
		4.02.01.102.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan atas LHP	1 Dok	1 Dok	25.151.487	1 Dok	49.500.000	1 Dok	49.500.000	1 Dok	49.500.000	1 Dok	49.500.000		
		4.02.01.102.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	12 Lap	12 lap	41.358.140	12 lap	53.960.000	12 lap	53.960.000	12 lap	53.960.000	12 lap	53.960.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Loka
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4.02.01.102.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	1 Lap	1 lap	8.820.000	1 lap	9.160.000	1 lap	9.160.000	1 lap	9.160.000	1 lap	9.160.000		
		4.02.01.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan barang milik daerah	12 Lap	12 lap	958.100.000	12 lap	1.050.367.914	12 lap	1.050.367.914	12 lap	1.050.367.914	12 lap	1.050.367.914		
		4.02.01.103.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Lap	4 lap	13.820.000	4 lap	51.607.914	4 lap	51.607.914	4 lap	51.607.914	4 lap	51.607.914		
		4.02.01.103.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dok	1 Dok	841.360.000	1 Dok	850.840.000	1 Dok	850.840.000	1 Dok	850.840.000	1 Dok	850.840.000		
		4.02.01.103.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan	1 lap	1 Lap	13.480.000	1 Lap	16.980.000	1 Lap	16.980.000	1 Lap	16.980.000	1 Lap	16.980.000		
		4.02.01.103.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan	1 Keg	1 keg	53.740.000	1 keg	57.240.000	1 keg	57.240.000	1 keg	57.240.000	1 keg	57.240.000		
		4.02.01.103.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan dan laporan	12 Lap	12 Lap	15.480.000	12 Lap	24.480.000	12 Lap	24.480.000	12 Lap	24.480.000	12 Lap	24.480.000		
		4.02.01.103.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	2 Lap	2 Lap	9.480.000	2 Lap	34.480.000	2 Lap	34.480.000	2 Lap	34.480.000	2 Lap	34.480.000		
		4.02.01.103.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dok	1 Dok	10.740.000	1 Dok	14.740.000	1 Dok	14.740.000	1 Dok	14.740.000	1 Dok	14.740.000		
		4.02.01.105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 Lap	12 Lap	3.493.930.000	12 Lap	3.938.331.600	12 Lap	3.938.331.600	12 Lap	3.938.331.600	12 Lap	3.938.331.600		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Loka
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4.02.01.105.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	12 paket	12 pkt	17.415.000	12 pkt	5.805.000	12 pkt	5.805.000	12 pkt	5.805.000	12 pkt	5.805.000		
		4.02.01.105.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	12 Paket	12 Paket	1.669.525.000	12 Paket	1.411.915.000	12 Paket	1.411.915.000	12 Paket	1.411.915.000	12 Paket	1.411.915.000		
		4.02.01.105.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Laporan	12 Lap	2.500.000	12 Lap	25.000.000	12 Lap	25.000.000	12 Lap	25.000.000	12 Lap	25.000.000		
		4.02.01.105.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	12 Laporan	12 Lap	536.800.000	12 Lap	811.074.000	12 Lap	811.074.000	12 Lap	811.074.000	12 Lap	811.074.000		
		4.02.01.105.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	12 Laporan	12 Lap	378.920.000	12 Lap	480.120.000	12 Lap	480.120.000	12 Lap	480.120.000	12 Lap	480.120.000		
		4.02.01.105.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Laporan	1 Lap	220.500.000	1 Lap	181.200.000	1 Lap	181.200.000	1 Lap	181.200.000	1 Lap	181.200.000		
		4.02.01.105.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 kali	1 kali	254.770.000	1 kali	515.368.800	1 kali	515.368.800	1 kali	515.368.800	1 kali	515.368.800		
		4.02.01.105.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	413.500.000	1 kali	507.848.800	1 kali	507.848.800	1 kali	507.848.800	1 kali	507.848.800		
		4.02.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan Barang dan Jasa	11 Laporan	11 Lap	13.485.322.415	11 Lap	14.744.316.220	11 Lap	14.744.316.220	11 Lap	14.744.316.220	11 Lap	14.744.316.220		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Loka
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4.02.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket pengadaan	1 Paket	1 pkt	615.974.400	1 pkt	615.974.400	1 pkt	615.974.400	1 pkt	615.974.400	1 pkt	615.974.400		
		4.02.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket pengadaan	1 Paket	1 pkt	66.500.000	1 pkt	36.500.000	1 pkt	36.500.000	1 pkt	36.500.000	1 pkt	36.500.000		
		4.02.01.106.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	1 Paket	1 pkt	763.803.000	1 pkt	840.093.000	1 pkt	840.093.000	1 pkt	840.093.000	1 pkt	840.093.000		
		4.02.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan	1 Paket	1 pkt	3.465.642.220	1 pkt	3.498.702.220	1 pkt	3.498.702.220	1 pkt	3.498.702.220	1 pkt	3.498.702.220		
		4.02.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	1 Paket	1 pkt	2.139.450.795	1 pkt	2.112.322.000	1 pkt	2.112.322.000	1 pkt	2.112.322.000	1 pkt	2.112.322.000		
		4.02.01.106.06	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangundangan	Jumlah paket pengadaan	1 Paket	1 pkt	656.120.000	1 pkt	656.120.000	1 pkt	656.120.000	1 pkt	656.120.000	1 pkt	656.120.000		
		4.02.01.106.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket pengadaan	1 Paket	1 pkt	7.000.000	1 pkt	20.250.000	1 pkt	20.250.000	1 pkt	20.250.000	1 pkt	20.250.000		
		4.02.01.106.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan	1 paket	1 pkt	4.339.600.000	1 pkt	5.129.600.000	1 pkt	5.129.600.000	1 pkt	5.129.600.000	1 pkt	5.129.600.000		
		4.02.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Lap	1.329.538.000	1 Lap	1.729.754.600	1 Lap	1.729.754.600	1 Lap	1.729.754.600	1 Lap	1.729.754.600		
		4.02.01.106.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif	3 Dokumen	3 Dok	90.000.000	3 Dok	90.000.000	3 Dok	90.000.000	3 Dok	90.000.000	3 Dok	90.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Loka
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4.02.01.106.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem informasi yang didukung	3 paket	3 paket	11.649.000	3 paket	15.000.000	3 paket	15.000.000	3 paket	15.000.000	3 paket	15.000.000		
		4.02.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan Sarana dan Prasarana	11 Laporan	11 Lap	19.498.047.747	11 Lap	2.770.856.500	11 Lap	2.770.856.500	11 Lap	2.770.856.500	11 Lap	2.770.856.500		
		4.02.01.107.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	1 Unit	1 Unit	500.000.000	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-		
		4.02.01.107.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	2 Unit	2 Unit	6.800.000.000	2 Unit	-	2 Unit	-	2 Unit	-	2 Unit	-		
		4.02.01.107.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	4 set	4 set	1.063.930.000	4 set	821.960.000	4 set	821.960.000	4 set	821.960.000	4 set	821.960.000		
		4.02.01.107.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Paket	2 pkt	8.969.009.547	2 pkt	1.094.746.500	2 pkt	1.094.746.500	2 pkt	1.094.746.500	2 pkt	1.094.746.500		
		4.02.01.107.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	4 Paket	4 pkt	75.000.000	4 pkt	-	4 pkt	-	4 pkt	-	4 pkt	-		
		4.02.01.107.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan	2 Paket	2 pkt	620.000.000	2 pkt	-	2 pkt	-	2 pkt	-	2 pkt	-		
		4.02.01.107.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	10 Unit	10 Unit	457.270.000	10 Unit	264.220.000	10 Unit	264.220.000	10 Unit	264.220.000	10 Unit	264.220.000		
		4.02.01.107.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	10 Unit	10 Unit	1.012.838.200	10 Unit	589.930.000	10 Unit	589.930.000	10 Unit	589.930.000	10 Unit	589.930.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Loka
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4.02.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Laporan	12 Lap	15.865.128.951	12 Lap	15.560.833.951	12 Lap	15.560.833.951	12 Lap	15.560.833.951	12 Lap	15.560.833.951		
		4.02.01.108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	50 Paket	50 pkt	31.496.605	50 pkt	31.496.605	50 pkt	31.496.605	50 pkt	31.496.605	50 pkt	31.496.605		
		4.02.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 bln	5.326.465.496	12 bln	5.326.465.496	12 bln	5.326.465.496	12 bln	5.326.465.496	12 bln	5.326.465.496		
		4.02.01.108.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 pkt	1.048.000.000	12 pkt	1.074.000.000	12 pkt	1.074.000.000	12 pkt	1.074.000.000	12 pkt	1.074.000.000		
		4.02.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket pelayanan umum kantor	12 Paket	12 pkt	9.459.166.850	12 pkt	9.128.871.850	12 pkt	9.128.871.850	12 pkt	9.128.871.850	12 pkt	9.128.871.850		
		4.02.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	12 Laporan	12 Lap	11.776.901.735	12 Lap	7.645.033.710	12 Lap	7.645.033.710	12 Lap	7.645.033.710	12 Lap	7.645.033.710		
		4.02.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	1 Paket	1 pkt	3.654.791.210	1 pkt	3.362.241.210	1 pkt	3.362.241.210	1 pkt	3.362.241.210	1 pkt	3.362.241.210		
		4.02.01.109.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	1 Paket	1 pkt	577.370.000	1 pkt	3.500.000	1 pkt	3.500.000	1 pkt	3.500.000	1 pkt	3.500.000		
		4.02.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Paket	1 pkt	4.316.110.000	1 pkt	2.815.595.000	1 pkt	2.815.595.000	1 pkt	2.815.595.000	1 pkt	2.815.595.000		
		4.02.01.109.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah terpeliharanya Aset Tetap Lainnya	1 laporan	1 lap	30.240.000	1 lap	30.240.000	1 lap	30.240.000	1 lap	30.240.000	1 lap	30.240.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Loka
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4.02.01.109.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah terpeliharanya Aset Tak Berwujud	1 laporan	1 lap	43.200.000	1 lap	86.400.000	1 lap	86.400.000	1 lap	86.400.000	1 lap	86.400.000		
		4.02.01.109.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 paket	1 pkt	2.119.257.500	1 pkt	889.657.500	1 pkt	889.657.500	1 pkt	889.657.500	1 pkt	1.005.000.000		
		4.02.01.109.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	1 paket	1 pkt	2.905.271.384	1 pkt	200.000.000	1 pkt	200.000.000	1 pkt	200.000.000	1 pkt	450.000.000		
		4.02.01.109.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 Unit	3 Unit	97.650.000	3 Unit	257.400.000	3 Unit	257.400.000	3 Unit	257.400.000	3 Unit	257.400.000		
		4.02.01.113	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan	1 Laporan	1 Lap	61.600.000	1 Lap	61.600.000	1 Lap	61.600.000	1 Lap	61.600.000	1 Lap	61.600.000		
		4.02.01.113.01	Penyiapan Materi Pimpinan	Prosentase materi Pimpinan yang tersedia tepat waktu	81 %	82	36.600.000	83	36.600.000	84	36.600.000	85	36.600.000	85	36.600.000		
		4.02.01.113.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah kegiatan pengelolaan dokumentasi pimpinan	360 Kegiatan	360 Keg	25.000.000	360 Keg	25.000.000	360 Keg	25.000.000	360 Keg	25.000.000	360 Keg	25.000.000		
		4.02.01.115	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Indeks kepuasan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	81 %	82	120.830.420.000	83	129.634.720.000	84	129.634.720.000	85	129.634.720.000	85	129.634.720.000		
		4.02.01.115.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Prosentase berkas administrasi keuangan DPRD yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai SOP	81 %	82	117.628.570.000	83	126.432.870.000	84	126.432.870.000	85	126.432.870.000	85	126.432.870.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Loka
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4.02.01.115.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang tersedia	120 Paket	120 pkt	2.601.850.000	120 pkt	2.601.850.000	120 pkt	2.601.850.000	120 pkt	2.601.850.000	120 pkt	2.601.850.000		
		4.02.01.115.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Prosentase kegiatan Medical Check Up DPRD yang terfasilitasi sesuai dengan permintaan DPRD	81 %	82	600.000.000	83	660.000.000	84	660.000.000	85	660.000.000	85	660.000.000		
		4.02.01.116	Layanan Administrasi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan administrasi	81 %	82	52.368.000	83	53.832.000	84	53.832.000	85	53.832.000	85	53.832.000		
		4.02.01.116.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Prosentase berkas administrasi keanggotaan DPRD yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai SOP	81 %	82	13.900.000	83	13.900.000	84	13.900.000	85	13.900.000	85	13.900.000		
		4.02.01.116.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan kegiatan fraksi	81 %	82	13.900.000	83	13.900.000	84	13.900.000	85	13.900.000	85	13.900.000		
		4.02.01.116.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Prosentase Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan sesuai dengan SOP dan Jadwal yang telah ditetapkan DPRD	81 %	82	13.032.000	83	13.032.000	84	13.032.000	85	13.032.000	85	13.032.000		
		4.02.01.116.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan kebutuhan Rumah Tangga DPRD	81 %	82	13.000.000	83	13.000.000	84	13.000.000	85	13.000.000	85	13.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Loka
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		40202	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan penyusunan perundang-undangan, penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pengawasan	81	82	207.352.658.020	83	220.972.939.200	84	220.972.939.200	85	234.268.861.700	85	234.268.861.700		
		402.02.02.101	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	1. Jumlah Pembahasan Raperda yang dilaksanakan sesuai jadwal 2. Jumlah FGD/ Publik Hearing Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD yang sesuai jadwal	10 Keg 10 Keg	10 Keg 10 Keg	40.704.894.400	10 Keg 10 Keg	68.864.054.000	10 Keg 10 Keg	68.864.054.000	10 Keg 10 Keg	72.864.054.000	10 Keg 10 Keg	72.864.054.000		
		402.02.02.101.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Prosentase kegiatan penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	81	82	74.850.000	83	74.850.000	84	74.850.000	85	74.850.000	85	74.850.000		
		402.02.02.101.02	Pembahasan Rancangan Perda	Prosentase kegiatan penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	81	82	39.549.464.400	83	67.689.664.000	84	67.689.664.000	85	71.689.664.000	85	71.689.664.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Loka
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		402.02.02.101.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Prosentase kegiatan penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	81	82	71.100.000	83	71.100.000	83	71.100.000	85	71.100.000	85	71.100.000		
		402.02.02.101.04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang tersusun	10	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000		
		402.02.02.101.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Prosentase kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD yang telah difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	81	82	9.480.000	83	28.440.000	84	28.440.000	85	28.440.000	85	28.440.000		
		402.02.02.102	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan fasilitasi kegiatan pembahasan anggaran oleh DPRD	2 lap	2 lap	7.324.031.600	2 lap	7.921.532.250	2 lap	7.921.532.250	2 lap	9.968.025.750	2 lap	9.968.025.750		
		402.02.02.102.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Prosentase kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	81	82	54.750.000	83	169.500.000	84	169.500.000	85	169.500.000	85	169.500.000		
		402.02.02.102.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Prosentase kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	81	82	13.850.000	83	129.500.000	84	129.500.000	85	129.500.000	85	129.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Loka
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		402.02.02.102.03	Pembahasan APBD	Prosentase kegiatan Pembahasan APBD yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	81	82	6.566.930.400	83	6.740.607.250	84	6.740.607.250	85	8.787.100.750	85	8.787.100.750		
		402.02.02.102.04	Pembahasan Perubahan APBD	Prosentase kegiatan Pembahasan Perubahan APBD yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	81	82	317.000.000	83	356.500.000	84	356.500.000	85	356.500.000	85	356.500.000		
		402.02.02.102.05	Pembahasan Laporan Semester	Prosentase kegiatan Pembahasan Laporan Semester yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	81	82	25.782.000	83	129.800.000	84	129.800.000	85	129.800.000	85	129.800.000		
		402.02.02.102.06	Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Prosentase kegiatan Pembahasan Pertanggung jawaban APBD yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	81	82	345.719.200	83	395.625.000	84	395.625.000	85	395.625.000	85	395.625.000		
		402.02.02.103	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan fasilitasi kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh DPRD	5 Lap	5 Lap	1.049.550.000	5 Lap	1.974.640.000	5 Lap	1.974.640.000	5 Lap	1.974.640.000	5 Lap	1.974.640.000		
		402.02.02.103.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Prosentase kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	81	82	157.200.000	83	242.520.000	84	242.520.000	85	242.520.000	85	242.520.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Loka
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		402.02.02.103.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Prosentase kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	81	82	157.200.000	83	242.520.000	84	242.520.000	85	242.520.000	85	242.520.000		
		402.02.02.103.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Prosentase kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	81	82	157.200.000	83	242.520.000	84	242.520.000	85	242.520.000	85	242.520.000		
		402.02.02.103.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Prosentase kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	81	82	252.000.000	83	252.000.000	84	252.000.000	85	252.000.000	85	252.000.000		
		402.02.02.103.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Prosentase kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	81	82	74.250.000	83	242.520.000	84	242.520.000	85	242.520.000	85	242.520.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Loka
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		402.02.02.103.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Prosentase kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	81	82	74.250.000	83	242.520.000	84	242.520.000	85	242.520.000	85	242.520.000		
		402.02.02.103.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Prosentase kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	81	82	103.200.000	83	267.520.000	84	267.520.000	85	267.520.000	85	267.520.000		
		402.02.02.103.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur	Prosentase kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	81	82	74.250.000	83	242.520.000	84	242.520.000	85	242.520.000	85	242.520.000		
		402.02.02.104	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	1 Lap	1 Lap	14.303.523.950	1 Lap	19.353.697.750	1 Lap	19.353.697.750	1 Lap	19.353.697.750	1 Lap	19.353.697.750		
		402.02.02.104.01	Orientasi DPRD	Prosentase kegiatan Orientasi DPRD yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	81	82	5.000.000	83	5.000.000	84	5.000.000	85	5.000.000	85	5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Loka
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		402.02.02.104.02	Pendalaman Tugas DPRD	Prosentase kegiatan Pendalaman Tugas DPRD yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	81	82	4.322.808.000	83	5.958.075.000	84	5.958.075.000	85	5.958.075.000	85	5.958.075.000		
		402.02.02.104.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Prosentase kegiatan Dewan yang terpublikasi dan terdokumentasi sesuai dengan SOP	81	82	7.916.817.200	83	10.162.013.600	84	10.162.013.600	85	10.162.013.600	85	10.162.013.600		
		402.02.02.104.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok pakar dan Tim Ahli yang tersedia	100 orang	100 org	848.000.000	100 org	1.984.000.000	100 org	1.984.000.000	100 org	1.984.000.000	100 org	1.984.000.000		
		402.02.02.104.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang tersedia	108 orang	108 org	864.000.000	108 org	864.000.000	108 org	864.000.000	108 org	864.000.000	108 org	864.000.000		
		402.02.02.104.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kehumasan yang telah diselenggarakan	81	82	331.648.750	83	360.859.150	84	360.859.150	85	360.859.150	85	360.859.150		
		402.02.02.104.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD yang tersusun	11 Dok	11 Dok	19.750.000	11 Dok	19.750.000	11 Dok	19.750.000	11 Dok	19.750.000	11 Dok	19.750.000		
		402.02.02.105	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1 Lap	1 Lap	63.772.092.595	1 Lap	46.710.720.000	1 Lap	46.710.720.000	1 Lap	46.710.720.000	1 Lap	49.710.720.000		
		402.02.02.105.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Prosentase kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	81	82	16.415.892.000	83	6.453.768.000	84	6.453.768.000	85	6.453.768.000	85	6.453.768.000		
		402.02.02.105.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Pokok-pokok Pikiran DPRD yang tersusun	42 Dok	42 Dok	7.900.000	42 Dok	19.750.000	42 Dok	19.750.000	42 Dok	19.750.000	42 Dok	19.750.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Loka
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		402.02.02.105.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah kegiatan reses yang difasilitasi	3 keg	3 keg	47.348.300.595	3 keg	40.237.202.000	3 keg	40.237.202.000	3 keg	40.237.202.000	3 keg	43.237.202.000		
		402.02.02.106	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi kegiatan pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD	1 Lap	1 Lap	55.300.000	1 Lap	67.150.000	1 Lap	67.150.000	1 Lap	67.150.000	1 Lap	67.150.000		
		402.02.02.106.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Prosentase kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD yang telah difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	81	82	7.900.000	83	19.750.000	84	19.750.000	85	19.750.000	85	19.750.000		
		402.02.02.106.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Prosentase kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD yang telah difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	81	82	47.400.000	83	47.400.000	84	47.400.000	85	47.400.000	85	47.400.000		
		402.02.02.107	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah laporan fasilitasi kegiatan pembahasan kerjasama daerah oleh DPRD	1 Lap	1 Lap	7.900.000	1 Lap	39.500.000	1 Lap	39.500.000	1 Lap	39.500.000	1 Lap	39.500.000		
		402.02.02.107.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Prosentase kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	81	82	3.950.000	83	19.750.000	84	19.750.000	85	19.750.000	85	19.750.000		
		402.02.02.107.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah bahan komunikasi dan publikasi yang tersusun	1200 dok	1200 dok	3.950.000	1200 dok	19.750.000	1200 dok	19.750.000	1200 dok	19.750.000	1200 dok	19.750.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Loka
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		402.02.02.108	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah laporan fasilitasi tugas DPRD	1 Lap	1 Lap	80.135.365.475	1 Lap	76.041.645.200	1 Lap	76.041.645.200	1 Lap	80.291.074.200	1 Lap	80.291.074.200		
		402.02.02.108.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Prosentase kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	81	82	77.028.726.475	83	72.494.683.000	84	72.494.683.000	85	76.744.112.000	85	76.744.112.000		
		402.02.02.108.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan kinerja DPRD yang tersusun	81	82	15.800.000	83	15.800.000	84	15.800.000	85	15.800.000	85	15.800.000		
		402.02.02.108.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Prosentase kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah yang dilaksanakan sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	81	82	106.650.000	83	106.650.000	84	106.650.000	85	106.650.000	85	106.650.000		
		402.02.02.108.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Prosentase kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD yang dilaksanakan sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	81	82	2.984.189.000	83	3.424.512.200	84	3.424.512.200	85	3.424.512.200	85	3.424.512.200		

**Tabel 6.3. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan 2022 sampai dengan Tahun 2024**  
(Sesuai dengan PMD 90 tahun 2019 dan KEMENDAGRI 050-5889 tahun 2021)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kerja dan Kerangka Pendanaan						13	14
						Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>402</b>	<b>Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur</b>										
<b>TUJUAN</b>													
Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja DPRD		<b>4.02.01</b>		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	81	84	452.314.688.495	85	459.564.117.495	85	459.564.117.495		
<b>SASARAN</b>													
Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya		<b>4.02.01</b>		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	81	84	452.314.688.495	85	459.564.117.495	85	459.564.117.495		
		4.02.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kepuasan masyarakat (DPRD) terhadap pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	83	84	225.295.255.795	85	225.295.255.795	85	225.295.255.795		
				Persentase indikator program yang tercapai	83%	84%		85%		85%			
				Persentase realisasi anggaran	80	80		80		80			
				Indeks profesionalitas ASN	60	60		60		60			
		4.02.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	4.652.378.400	9 Dokumen	4.652.378.400	9 Dokumen	4.652.378.400		
		4.02.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	1.816.823.800	11 Dokumen	2.620.474.400	11 Dokumen	1.816.823.800		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kerja dan Kerangka Pendanaan						13	14
						Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4.02.01.101.02	Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.170.193.800	1 Dokumen	1.170.193.800	1 Dokumen	1.170.193.800		
		4.02.01.101.101.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	200.440.000	1 Dokumen	200.440.000	1 Dokumen	200.440.000		
		4.02.01.101.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	222.440.000	1 Dokumen	222.440.000	1 Dokumen	222.440.000		
		4.02.01.101.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	279.440.000	1 Dokumen	279.440.000	1 Dokumen	279.440.000		
		4.02.01.101.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	96.440.000	5 Laporan	96.440.000	5 Laporan	96.440.000		
		4.02.01.101.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	866.600.800	4 Laporan	866.600.800	4 Laporan	866.600.800		
		4.02.01.102.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	12 Laporan	43.133.238.000	12 Laporan	43.133.238.000	12 Laporan	43.133.238.000		
		4.02.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	121 org/ Bulan	121 Orang/ Bulan	34.357.980.000	121 Org/ Bulan	34.357.980.000	121 Org/ Bulan	34.357.980.000		
		4.02.01.102.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	8.270.878.000	1 Dokumen	8.270.878.000	1 Dokumen	8.270.878.000		
		4.02.01.102.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	304.960.000	1 Dokumen	304.960.000	1 Dokumen	304.960.000		
		4.02.01.102.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	42.480.000	1 Dokumen	42.480.000	1 Dokumen	42.480.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kerja dan Kerangka Pendanaan						13	14
						Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4.02.01.102.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	44.320.000	2 Laporan	44.320.000	2 Laporan	44.320.000		
		4.02.01.102.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	49.500.000	2 Dokumen	49.500.000	2 Dokumen	49.500.000		
		4.02.01.102.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	53.960.000	1 Laporan	53.960.000	1 Laporan	53.960.000		
		4.02.01.102.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	9.160.000	1 Dokumen	9.160.000	1 Dokumen	9.160.000		
		4.02.01.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan barang milik daerah	12 Laporan	12 Laporan	1.050.367.914	12 Laporan	1.050.367.914	12 Laporan	1.050.367.914		
		4.02.01.103.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	51.607.900	4 Dokumen	51.607.900	4 Dokumen	51.607.900		
		4.02.01.103.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	850.840.000	1 Dokumen	850.840.000	1 Dokumen	850.840.000		
		4.02.01.103.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	16.980.000	1 Laporan	16.980.000	1 Laporan	16.980.000		
		4.02.01.103.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	57.240.000	1 Laporan	57.240.000	1 Laporan	57.240.000		
		4.02.01.103.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	24.480.000	12 Laporan	24.480.000	12 Laporan	24.480.000		
		4.02.01.103.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	34.480.000	2 Laporan	34.480.000	2 Laporan	34.480.000		
		4.02.01.103.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	14.740.000	1 Dokumen	14.740.000	1 Dokumen	14.740.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kerja dan Kerangka Pendanaan						13	14
						Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4.02.01.105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	3.938.331.600	12 Dokumen	3.938.331.600	12 Dokumen	3.938.331.600		
		4.02.01.105.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	5.805.000	1 Unit	5.805.000	1 Unit	5.805.000		
		4.02.01.105.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	10 Paket	1.411.915.000	10 Paket	1.411.915.000	10 Paket	1.411.915.000		
		4.02.01.105.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000		
		4.02.01.105.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	811.074.000	12 Dokumen	811.074.000	12 Dokumen	811.074.000		
		4.02.01.105.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	480.120.000	12 Dokumen	480.120.000	12 Dokumen	480.120.000		
		4.02.01.105.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120 Orang	120 Orang	181.200.000	120 Orang	181.200.000	120 Orang	181.200.000		
		4.02.01.105.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	150 Orang	515.368.800	150 Orang	515.368.800	150 Orang	515.368.800		
		4.02.01.105.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	150 Orang	507.848.800	150 Orang	507.848.800	150 Orang	507.848.800		
		4.02.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan Barang dan Jasa	11 Laporan	11 Laporan	14.744.316.220	11 Laporan	14.744.316.220	11 Laporan	14.744.316.220		
		4.02.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	615.974.400	1 Paket	615.974.400	1 Paket	615.974.400		
		4.02.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	36.500.000	1 Paket	36.500.000	1 Paket	36.500.000		
		4.02.01.106.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	840.093.000	1 Paket	840.093.000	1 Paket	840.093.000		
		4.02.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.498.702.220	1 Paket	3.498.702.220	1 Paket	3.498.702.220		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kerja dan Kerangka Pendanaan						13	14
						Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4.02.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.112.322.000	1 Paket	2.112.322.000	1 Paket	2.112.322.000		
		4.02.01.106.06	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	300 Dokumen	300 Dokumen	656.120.000	300 Dokumen	656.120.000	300 Dokumen	656.120.000		
		4.02.01.106.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.250.000	1 Paket	20.250.000	1 Paket	20.250.000		
		4.02.01.106.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	5.129.600.000	1 Laporan	5.129.600.000	1 Laporan	5.129.600.000		
		4.02.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.729.754.600	1 Laporan	1.729.754.600	1 Laporan	1.729.754.600		
		4.02.01.106.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	90.000.000	3 Dokumen	90.000.000	3 Dokumen	90.000.000		
		4.02.01.106.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000		
		4.02.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan Sarana dan Prasana	11 Laporan	11 Laporan	2.770.856.500	11 Laporan	2.770.856.500	11 Laporan	2.770.856.500		
		4.02.01.107.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Unit		Unit		Unit			
		4.02.01.107.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit		unit		Unit			
		4.02.01.107.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	821.960.000	4 Paket	821.960.000	4 Paket	821.960.000		
		4.02.01.107.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	1.094.746.500	2 Unit	1.094.746.500	2 Unit	1.094.746.500		
		4.02.01.107.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit		Unit		Unit			
		4.02.01.107.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	Unit		Unit		Unit			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kerja dan Kerangka Pendanaan						13	14
						Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4.02.01.107.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	264.220.000	10 Unit	264.220.000	10 Unit	264.220.000		
		4.02.01.107.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	589.930.000	10 Unit	589.930.000	10 Unit	589.930.000		
		4.02.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	12 Laporan	16.810.833.951	12 Laporan	16.810.833.951	12 Laporan	16.810.833.951		
		4.02.01.108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	31.496.605	12 Laporan	31.496.600	12 Laporan	31.496.600		
		4.02.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.826.465.496	12 Laporan	5.826.465.000	12 Laporan	5.826.465.000		
		4.02.01.108.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.824.000.000	12 Laporan	1.824.000.000	12 Laporan	1.824.000.000		
		4.02.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.128.871.850	12 Laporan	9.128.871.850	12 Laporan	9.128.871.850		
		4.02.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	12 Laporan	12 Laporan	8.444.781.210	12 Laporan	8.444.781.210	12 Laporan	8.444.781.210		
		4.02.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	86 Unit	89 Unit	3.362.241.210	89 Unit	3.362.241.210	89 Unit	3.362.241.210		
		4.02.01.109.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	3.500.000	1 Unit	850.000.000	1 Unit	3.500.000		
		4.02.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	3.250.000.000	1 Unit	3.250.000.000	1 Unit	3.250.000.000		
		4.02.01.109.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	30.240.000	1 Unit	30.240.000	1 Unit	30.240.000		
		4.02.01.109.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	86.400.000	1 Unit	1.286.400.000	1 Unit	1.286.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kerja dan Kerangka Pendanaan						13	14
						Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		4.02.01.109.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	1.100.500.000	3 Unit	2.700.500.000	3 Unit	2.700.500.000		
		4.02.01.109.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	450.000.000	3 Unit	450.000.000	3 Unit	450.000.000		
		4.02.01.109.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	257.400.000	3 Unit	257.400.000	3 Unit	257.400.000		
		4.02.01.113	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan	1 Laporan	1 Laporan	61.600.000	1 Laporan	61.600.000	1 Laporan	61.600.000		
		4.02.01.113.01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	36.600.000	1 Dokumen	36.600.000	1 Dokumen	36.600.000		
		4.02.01.113.03	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0		
		4.02.01.113.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000		
		4.02.01.115	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Indeks kepuasan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	84	84	129.634.720.000	85	129.634.720.000	85	129.634.720.000		
		4.02.01.115.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	120 org/ Bulan	120 org/ Bulan	126.432.870.000	120 org/ Bulan	126.432.870.000	120 org/ Bulan	126.432.870.000		
		4.02.01.115.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	2.601.850.000	5 Paket	2.601.850.000	5 Paket	2.601.850.000		
		4.02.01.115.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	120 Orang	120 Orang	600.000.000	120 Orang	600.000.000	120 Orang	600.000.000		
		4.02.01.116	Layanan Administrasi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan administrasi	84	84	53.832.000	85	53.832.000	85	53.832.000		
		4.02.01.116.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	13.900.000	1 Dokumen	13.900.000	1 Dokumen	13.900.000		
		4.02.01.116.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	9 Laporan	8 Laporan	13.900.000	8 Laporan	13.900.000	8 Laporan	13.900.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kerja dan Kerangka Pendanaan						13	14
						Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4.02.01.116.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	5 Laporan	5 Laporan	13.032.000	5 Laporan	13.032.000	5 Laporan	13.032.000		
		4.02.01.116.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.000.000	1 Paket	13.000.000	1 Paket	13.000.000		
		<b>40202</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan penyusunan perundang-undangan, penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pengawasan</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>227.019.432.700</b>	<b>85</b>	<b>234.268.861.700</b>	<b>85</b>	<b>234.268.861.700</b>		
		402.02.02.101	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	1. Jumlah Pembahasan Raperda yang dilaksanakan sesuai jadwal 2. Jumlah FGD/ Publik Hearing Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD yang sesuai jadwal	10 keg 10 keg	10 keg 10 keg	70.864.054.000	10 keg 10 keg	72.864.054.000	10 keg 10 keg	72.864.054.000		
		402.02.02.101.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	74.850.000	1 Dokumen	74.850.000	1 Dokumen	74.850.000		
		402.02.02.101.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	69.689.664.000	1 Dokumen	71.689.664.000	1 Dokumen	71.689.664.000		
		402.02.02.101.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	71.100.000	1 Dokumen	71.100.000	1 Dokumen	71.100.000		
		402.02.02.101.04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000		
		402.02.02.101.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	28.440.000	1 Dokumen	28.440.000	1 Dokumen	28.440.000		
		402.02.02.102	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan fasilitasi kegiatan pembahasan anggaran oleh DPRD	2 Laporan	2 Laporan	7.968.025.750	2 Laporan	9.968.025.750	2 Laporan	9.968.025.750		
		402.02.02.102.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	169.500.000	1 Dokumen	169.500.000	1 Dokumen	169.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kerja dan Kerangka Pendanaan						13	14
						Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		402.02.02.102.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	129.500.000	1 Dokumen	129.500.000	1 Dokumen	129.500.000		
		402.02.02.102.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.787.100.750	1 Dokumen	8.787.100.750	1 Dokumen	8.787.100.750		
		402.02.02.102.04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	356.500.000	1 Dokumen	356.500.000	1 Dokumen	356.500.000		
		402.02.02.102.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	1 Dokumen	129.800.000	1 Dokumen	129.800.000	1 Dokumen	129.800.000		
		402.02.02.102.06	Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	395.625.000	1 Dokumen	395.625.000	1 Dokumen	395.625.000		
		402.02.02.103	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan fasilitasi kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh DPRD	5 Laporan	5 Laporan	1.974.640.000	5 Laporan	1.974.640.000	5 Laporan	1.974.640.000		
		402.02.02.103.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	1 Laporan	242.520.000	1 Laporan	242.520.000	1 Laporan	242.520.000		
		402.02.02.103.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	242.520.000	1 Laporan	242.520.000	1 Laporan	242.520.000		
		402.02.02.103.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	1 Laporan	242.520.000	1 Laporan	242.520.000	1 Laporan	242.520.000		
		402.02.02.103.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	252.000.000	1 Laporan	252.000.000	1 Laporan	252.000.000		
		402.02.02.103.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam.	1 Laporan	1 Laporan	242.520.000	1 Laporan	242.520.000	1 Laporan	242.520.000		
		402.02.02.103.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	242.520.000	1 Dokumen	242.520.000	1 Dokumen	242.520.000		
		402.02.02.103.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	267.520.000	1 Dokumen	267.520.000	1 Dokumen	267.520.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kerja dan Kerangka Pendanaan						13	14
						Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		402.02.02.103.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan	242.520.000	1 Laporan	242.520.000	1 Laporan	242.520.000		
		402.02.02.104	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	1 Laporan	1 Laporan	19.353.697.750	1 Laporan	19.353.697.750	1 Laporan	19.353.697.750		
		402.02.02.104.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000		
		402.02.02.104.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.958.075.000	1 Dokumen	5.958.075.000	1 Dokumen	5.958.075.000		
		402.02.02.104.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.162.013.600	1 Dokumen	10.162.013.600	1 Dokumen	20.162.013.600		
		402.02.02.104.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	120 Orang	120 Orang	1.984.000.000	120 Orang	1.984.000.000	120 Orang	1.984.000.000		
		402.02.02.104.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	9 Orang	864.000.000	9 Orang	864.000.000	9 Orang	864.000.000		
		402.02.02.104.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	360.859.150	1 Dokumen	360.859.150	1 Dokumen	360.859.150		
		402.02.02.104.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	19.750.000	1 Dokumen	19.750.000	1 Dokumen	19.750.000		
		402.02.02.105	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	48.710.720.000	1 Laporan	49.710.720.000	1 Laporan	49.710.720.000		
		402.02.02.105.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	1 Laporan	6.453.768.000	1 Laporan	6.453.768.000	1 Laporan	6.453.768.000		
		402.02.02.105.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	19.750.000	1 Dokumen	19.750.000	1 Dokumen	19.750.000		
		402.02.02.105.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1 Dokumen	1 Dokumen	42.237.202.000	1 Dokumen	43.237.202.000	1 Dokumen	43.237.202.000		
		402.02.02.106	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Fasilitas kegiatan pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	1 Laporan	67.150.000	1 Laporan	67.150.000	1 Laporan	67.150.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kerja dan Kerangka Pendanaan						13	14
						Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		402.02.02.106.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	19.750.000	1 Dokumen	19.750.000	1 Dokumen	19.750.000		
		402.02.02.106.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	1 Laporan	47.400.000	1 Laporan	47.400.000	1 Laporan	47.400.000		
		402.02.02.107	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah laporan fasilitasi kegiatan pembahasan kerjasama daerah oleh DPRD	1 Laporan	1 Laporan	39.500.000	1 Laporan	39.500.000	1 Laporan	39.500.000		
		402.02.02.107.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	-	19.750.000	1 Dokumen	19.750.000	1 Dokumen	19.750.000		
		402.02.02.107.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	19.750.000	1 Dokumen	19.750.000	1 Dokumen	19.750.000		
		402.02.02.108	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah laporan fasilitasi tugas DPRD	1 Laporan	1 Laporan	78.041645.200	1 Laporan	80.291.074.200	1 Laporan	80.291.074.200		
		402.02.02.108.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	74.494.683.000	1 Dokumen	76.744.112.000	1 Dokumen	76.744.112.000		
		402.02.02.108.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	15.800.000	1 Laporan	15.800.000	1 Laporan	15.800.000		
		402.02.02.108.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	1 Dokumen	106.650.000	1 Dokumen	106.650.000	1 Dokumen	106.650.000		
		402.02.02.108.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.424.512.200	1 Dokumen	3.424.512.200	1 Dokumen	3.424.512.200		
		402.02.02.108.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	406.083.750	1 Dokumen	406.083.750		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN LAYANAN KESEKRETARIATAN DPRD**

Mengacu pada RPJMD 2019-2024, indikator kinerja Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang merupakan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Sebagaimana Visi RPJMD Tahun 2019-2024 :

*"Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong"* Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur melaksanakan Misi ke 3 (tiga) RPJMD yaitu *"Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan"* dengan tujuan RPJMD "Menciptakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, bersih, kompeten, profesional, partisipatoris, dan berorientasi pada pelayanan prima", dengan indikator tujuan RPJMD "Indeks Reformasi Birokrasi" memiliki sasaran RPJMD "Meningkatnya kualitas layanan publik" dengan indikator sasaran RPJMD "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM/SKM)" dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah "Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD" dengan indikator tujuan Renstra "Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD" dan sasaran Renstra Perangkat Daerah "Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya" dengan indikator sasaran Renstra "Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD".

Berdasarkan RPJMD 2019-2024, maka indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang baru merupakan aktualisasi penyelenggaraan/pelaksanaan program prioritas yang diamanatkan kepada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur melalui kegiatan pokok yang relevan dengan tugas dan fungsi dalam kerangka menggapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Berkaitan hal tersebut, maka rumusan indikator kinerja Perangkat Daerah akan dituangkan sebagaimana Tabel 7.1 dibawah ini diharapkan akan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2019	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	78,5	81	82	83	84	85	85

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dan berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur adalah Misi Ketiga, yaitu :

“Tata kelola Pemerintahan yang bersih, Inovatif, Terbuka Partisipatoris Memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan” .

Memperhatikan Janji Politis (Nawa Bhakti) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2019 - 2024, yaitu :

1. Jatim Sejahtera : Mengentaskan kemiskinan menuju Keadilan & Kesejahteraan Sosial;
2. Jatim Kerja : Memperluas lapangan Pekerjaan dan membangun keunggulan Ekonomi;
3. Jatim Cerdas dan Sehat : Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas;
4. Jatim Akses : Membangun Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan;
5. Jatim Berkah : Membangun Karakter Masyarakat yang berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas;

6. Jatim Agro : Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan;
7. Jatim Berdaya : Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM desa dan mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
8. Jatim Amanah : Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif & Anti Korupsi dengan menerapkan Pemerintahan yang CETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan dan Responsif);
9. Jatim Harmoni : Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.

Keterkaitan Misi dengan Nawa Bhakti Satya berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur adalah Bhakti 8 – Jatim :

- Jatim Amanah : Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi dengan menerapkan Pemerintahan yang CETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan dan Responsif).

Keterkaitan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Nawa Bhakti Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 dijabarkan pada Tabel 7.2 berikut ini

**Tabel 7.2. Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Nawa Bhakti**

Nawa Bhakti Satya	Program Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN			
					2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bhakti – 8 : Jatim : Jatim Amanah : "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi dengan menerapkan pemerintahan yang CETTAR (Cepat, Efisien, Tanggap, Transparan dan Responsif)	Kesekretariatan DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		<b>207.352.658.020,00</b>	<b>220.972.939.200,00</b>	<b>227.019.432.700,00</b>	<b>234.268.861.700,00</b>
					<b>40.704.894.400,00</b>	<b>68.864.054.000,00</b>	<b>70.864.054.000,00</b>	<b>72.864.054.000,00</b>
				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	74.850.000,00	74.850.000,00	74.850.000,00	74.850.000,00
				Pembahasan Rancangan Perda	39.549.464.400,00	67.689.664.000,00	69.689.664.000,00	71.689.664.000,00
				Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	71.100.000,00	71.100.000,00	71.100.000,00	50.750.000,00
				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/ atau Naskah Akademik	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
				Penyusunan Tata Tertib DPRD	9.480.000,00	28.440.000,00	28.440.000,00	28.440.000,00
					<b>7.324.031.400,00</b>	<b>7.921.532.250,00</b>	<b>7.968.025.750,00</b>	<b>9.968.025.750,00</b>
				Pembahasan Kebijakan Anggaran				
				Pembahasan KUA dan PPAS	54.750.000,00	169.500.000,00	169.500.000,00	169.500.000,00
				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	13.850.000,00	129.500.000,00	129.500.000,00	129.500.000,00
				Pembahasan APBD	6.566.930.400,00	6.740.607.250,00	6.787.100.750,00	8.787.100.750,00
				Pembahasan Perubahan APBD	371.000.000,00	356.500.000,00	356.500.000,00	356.500.000,00
				Pembahasan Laporan Semester	25.782.000,00	129.800.000,00	129.800.000,00	129.800.000,00
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	345.719.200,00	395.625.000,00	395.625.000,00	395.625.000,00				

Nawa Bhakti Satya	Program Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN			
					2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		1.049.550.000,00	1.974.640.000,00	1.974.640.000,00	1.974.640.000,00
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		157.200.000,00	242.520.000,00	242.520.000,00	242.520.000,00
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		157.200.000,00	242.520.000,00	242.520.000,00	242.520.000,00
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		157.200.000,00	242.520.000,00	242.520.000,00	242.520.000,00
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		252.520.000,00	252.520.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		74.250.000,00	242.520.000,00	242.520.000,00	242.520.000,00
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		74.250.000,00	242.520.000,00	242.520.000,00	242.520.000,00
			Pengawasan Penggunaan Anggaran		103.200.000,00	267.520.000,00	267.520.000,00	267.520.000,00
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur		74.250.000,00	242.520.000,00	242.520.000,00	242.520.000,00

Nawa Bhakti Satya	Program Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN			
					2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Peningkatan Kapasitas DPRD		<b>14.303.523.950,00</b>	<b>19.353.697.750,00</b>	<b>19.353.697.750,00</b>	<b>19.353.697.750,00</b>
			Orientasi DPRD		500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			Pendalaman Tugas DPRD		4.322.808.000,00	5.958.075.000,00	5.958.075.000,00	5.958.075.000,00
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan		7.916.817.200,00	10.162.013.600,00	10.162.013.600,00	10.162.013.600,00
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		848.000.000,00	1.984.000.000,00	1.984.000.000,00	1.984.000.000,00
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		864.000.000,00	864.000.000,00	864.000.000,00	864.000.000,00
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		331.648.750,00	360.859.150,00	360.859.150,00	360.859.150,00
			Penyusunan Program Kerja DPRD		19.750.000,00	19.750.000,00	19.750.000,00	19.750.000,00
			<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>		<b>57.753.176.595,00</b>	<b>46.710.720.000,00</b>	<b>48.710.720.000,00</b>	<b>49.710.720.000,00</b>
			Kunjungan Kerja dalam Daerah		12.591.826.000,00	6.453.768.000,00	6.453.768.000,00	6.453.768.000,00
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		7.900.000,00	19.750.000,00	19.750.000,00	19.750.000,00
			Pelaksanaan Reses		47.348.300.595,00	40.237.202.000,00	42.237.202.000,00	43.237.202.000,00
			<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>		<b>55.300.000,00</b>	<b>67.150.000,00</b>	<b>67.150.000,00</b>	<b>67.150.000,00</b>
			Penyusunan Kode Etik DPRD		7.900.000,00	19.750.000,00	19.750.000,00	19.750.000,00
			Pengawasan Kode Etik DPRD		47.400.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00

Nawa Bhakti Satya	Program Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN			
					2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pembahasan Kerja Sama Daerah		7.900.000,00	39.500.000,00	39.500.000,00	39.500.000,00
			Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah		3.950.000,00	19.750.000,00	19.750.000,00	19.750.000,00
			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		3.950.000,00	19.750.000,00	19.750.000,00	19.750.000,00
					<b>80.135.365.475,00</b>	<b>76.041.645.200,00</b>	<b>78.041.645.200,00</b>	<b>80.291.074.200,00</b>
			Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	77.028.726.475,00	72.494.683.000,00	74.494.683.000,00	76.744.112.000,00
				Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	15.800.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	106.650.000,00	106.650.000,00	106.650.000,00	106.650.000,00
				Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3.468.084.000,00	3.424.512.200,00	3.424.512.200,00	3.424.512.200,00
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	0	0	0	406.083.750,00

## **BAB VIII PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 merupakan penyempurnaan penjabaran secara operasional dari Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 yang memuat arahan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Dengan tersusunnya Perubahan Kedua Rencana Strategis Sekretariat DPRD ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai :

- a. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan dan bahan penyusunan RKPD;
- b. Pedoman dan tolak ukur kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD guna mendukung suksesnya Program Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur.
- c. Sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja bagi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Surabaya,

2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

**Dr. ANDIK FADJAR TJAHHONO Drs., M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19660917 199103 1 012

